BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2018
PROVINSI BENGKULU
SABTU, 2 JUNI 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

☐ POSITIF ☒ NETRAL ☐ BAHAN PEMERIKSAAN ☐ PERHATIAN KHUSUS

Sambungan dari halaman 1

Untuk temuan terkait pemeriksaan atas sistem pengendalian diantaranya terdapat kesalahan penganggaran dan penyajian belanja barang dan jasa serta belanja modal pada 19 OPD. Kemudian penatausahaan aset tetap dan penyerahan aset AMA/SMK dari kabupaten/kota yang belum memadai dan terdapat permasalahan aset peralatan dan mesin yang telah diungkapkan dalam LHP BPK sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.

Untuk temuan pemeriksaan yang menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain terdapat kelebihan pembayaran upah pada kegiatan pemeliharaan jembatan Provinsi bengkulu, kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun dan kegiatan optimalisasi fungsi yang menjadi kewenangan provinsi.

Kemudian kelebihan pembayaran pekerjaan dan potensi kerugian pada kegiatan peningkatan jalan, denda keterlambatan yang belum dipungut, dan jaminan pelaksana yang tidak dicairkan pada 26 paket kegiatan pada 4 OPD.

Terkait catatan dan temuan-temuan ini, Rohidin mengatakan akan segera akan diselesaikan. "BPK minta kita menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Ini dapat mendorong dan memotivasi pemerintah provinsi untuk terus memperbaiki peranggungjawaban pelaksanaan APBD," ujar Rohidin.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri, S.Sos berharap pemprov tidak lengah dan terlena dengan pencapaian WTP karena ke depan harus dipertahankan dan lebih baik lagi. "Jangan menjadikan kita lengah. Kepada Plt Gubernur, apa yang menjadi rekomendasi BPK harus segera kita tindaklanjuti bersama," ujar Ihsan.

Waka III Elfi Hamidy menambahkan, WTP yang diraih ini karena pada tahun sebelumnya temuan kerugian negara yang bersifat materil sudah ditindaklanjuti dan tinggal sedikit. "Ini berkat kerjasama antara BPK, Pemprov dan juga pihak DPRD yang selalu berkomunikasi untuk menghalangi hal-hal yang bisa menghambat untuk mendapatkan WTP. Ke depan saya yakin kerjasama ini akan tetap berlanjut dan pemprov tahun depan tetap mendapat WTP," kata Elfi.

Kepala perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu Yuan Candra Djaisin mengatakan bahwa penyampaian pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraund) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika ditemukan ada penyimpangan atau kecurangan dalam pemeriksaan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara tetap harus diungkap dalam LHP.

Dikatakan Yuan, opini WTP yang diberikan oleh BPK kepada pemprov merupakan pernyataan provesional BPK mengenai kewajaran laporan keuangan. Namun bukan jaminan tidak adanya pelanggaran atau penyimpangan yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya penyimpangan dikemudian hari. "Ini perlu dipahami bersama mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK," jelas Yuan.

Terpisah, menurut Pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Juanda, SH, MH bahwa WTP itu hanya menyangkut persoalan laporan keuangan secara formal. Tapi secara de facto belum tentu tidak terdapat pelanggaran hukum. "Jangan terlena dan terlalu berbangga hati, ini hanya menyangkut persoalan laporan keuangan secara formal. Secara de facto, bisa saja masih terdapat penyimpangan," kata Juanda.

Karena, persoalan pelanggaran hukum bukan urusannya BPK melainkan urusan penegak hukum. "Bisa jadi kalau ditemukan ada pelanggaran hukum atau kecurangan dalam rangka pelaporan keuangan yang sifatnya fiktif, tetap akan diusut oleh aparat. Mungkin di atas kertas bagus tapi tidak menutup kemungkinan masih terjadi pelanggaran hukum," ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya pemprov mendapat opini WTP dari BPK RI perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2014 lalu saat kepemimpinan Junaidi Hamsyah selaku Gubernur Bengkulu pada saat itu. Kemudian selama kepemimpinan Ridwan Mukti tahun 2015-2016 pemprov gagal mendapat opini WTP melainkan mendapat WDP atau menurun dari opini yang didapat tahun 2014.**(tew)**

Kepemimpinan Rohidin, Sukses Raih WTP

BPK Tinggalkan Catatan

BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 di bawah kepemimpinan Plt Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.MA.

Namun dibalik WTP itu, BPK meninggalkan beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov. BPK masih menemukan beberapa permasalahan seperti temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, temuan menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan lainnya.

▸ *Baca BPK...Hal 11*